

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016-2018**



Skripsi oleh:

MUSTINA AYU

(01021181520199)

EKONOMI PEMBANGUNAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016-2018**

Disusun oleh :

Nama : Mustina Ayu
NIM : 01021181520199
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

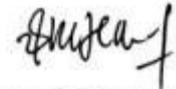
Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 2 Maret 2020
Pembimbing Skripsi I


Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc
NIP. 196402161989032001

Tanggal: 28 Februari 2020
Pembimbing Skripsi II


Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP.197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016-2018**

Disusun oleh :

Nama : Mustina Ayu
NIM : 01021181520199
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 8 April 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia ujian komprehensif
Indralaya, 8 April 2020

Ketua

Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc
NIP. 196402161989032001

Anggota

Dr. Anna Yulianita S.E. M.Si
NIP.197007162008012015

Anggota

Dr. Siti Rohma S.E. M.Si
NIP.196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis S.E. M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustina Ayu
NIM : 01021181520199
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian: Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018”**

Pembimbing Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc
Anggota : Dr. Anna Yulianita S.E, M,Si
Tanggal diuji : 8 April 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 8 April 2020

Pembuat Pernyataan

Mustina Ayu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018”**. Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi saya membahas mengenai beberapa komponen variabel yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, saya tidak luput dari berbagai kendala yang akhirnya dapat diselesaikan berkat doa, bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Palembang, 8 April 2020

Mustina Ayu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	12

2.2 Definisi Konsep.....	14
2.2.1 Pendapatan Nasional.....	14
2.2.2 Pengeluaran Pemerintah.....	17
2.2.3 Belanja Daerah.....	18
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	24
2.4 Kerangka Pikir.....	27
2.5 Hipotesis.....	29
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.4.1 Regresi Data Panel.....	32
3.4.2 Model Regresi Data Panel.....	32
3.4.3 Pemilihan Teknik Estimasi.....	34
3.4.4 Uji Signifikansi.....	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Sumatera Selatan	40
4.1.1 Luas dan Batasan Wilayah Administrasi.....	40
4.1.2 Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja	42
4.1.3 Infrastruktur Publik	45
4.1.4 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	48

4.2 Hasil Estimasi PDRB Terhadap Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal	56
4.2.1 Pemilihan Model Terbaik	57
4.2.2 Analisis Individu	60
4.2.3 Uji Statistik	61
4.2.4 Hasil Uji Analisis Statistik	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Postur Belanja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.....	3
Tabel 1.2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	5
Tabel 1.3	Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	6
Tabel 1.4	Belanja Barang di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	7
Tabel 1.5	Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	8
Tabel 4.1	Luas Wilayah, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.....	41
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	43
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018.....	44
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah, Rumah Sakit dan Panjang Jalan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.....	47
Tabel 4.5	Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	48
Tabel 4.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018.....	54
Tabel 4.7	Hasil Regresi Menggunakan Metode <i>Common Effect</i> , <i>Fixed Effect</i> , dan <i>Random Effect</i>	57
Tabel 4.8	Hasil Regresi Menggunakan <i>Uji Chow</i> (<i>Redundant Test</i>).....	58
Tabel 4.9	Hasil Regresi Menggunakan Uji Hausman.....	58
Tabel 4.10	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	59
Tabel 4.11	Nilai Intersep Setiap Individu (Kabupaten/Kota).....	60
Tabel 4.12	Koefisien, t Hitung dan t Tabel dari Variabel Independen.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	29
Gambar 3.1	Uji F.....	36
Gambar 3.2	Uji Hipotesis Dua Pihak.....	38
Gambar 4.1	Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	76
Lampiran 2.	Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	77
Lampiran 3.	Belanja Barang di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	78
Lampiran 4.	Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018.....	79
Lampiran 5.	<i>Pooled Least Square</i>	80
Lampiran 6.	<i>Fixed Effect Model</i>	81
Lampiran 7.	<i>Random Effect Model</i>	82
Lampiran 8.	Uji <i>Chow</i>	83
Lampiran 9.	Uji <i>Hausman</i>	84

ABSTRAK

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016-2018

Oleh:

Mustina Ayu; Bernadette Robiani; Anna Yulianita

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Ditjen Perbendaharaan (DJPbN) provinsi Sumatera Selatan dan BPS Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Panel. Model data panel yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di seluruh kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9972 artinya variasi variabel PDRB sebesar 99,72 persen di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan oleh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Lalu 0,28 sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lainnya.

Kata kunci: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, PDRB, *Fixed Effect Model (FEM)*

Ketua

Prof. Dr. Bernadette Robiani M.Sc
NIP. 196402161989032001

Anggota

Dr. Anna Yulianita S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

EFFECTS OF THE EMPLOYEE, GOODS, AND CAPITAL EXPENDITURE TO GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS (GRDP) IN DISTRICTS/ CITIES OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN 2016-2018

By:

Mustina Ayu; Bernadette Robiani; Anna Yulianita

This study aimed to find out the effects of employee, goods, and capital expenditure on Gross Regional Domestic Product (GRDP) in districts/cities in South Sumatra province in 2016-2018. The data used in the study were secondary data obtained from the Directorate General of Treasury (*DJPbN*) of South Sumatra Province and *Badan Pusat Statistik* (Agency of Statistical Center) of South Sumatra. This study used Panel data analysis techniques. The panel data model used the Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the employee and goods expenditure had a positive and significant effect on the district/city GRDP of South Sumatra province. Meanwhile, the capital expenditure had a negative and insignificant effect on GRDP of all districts/cities in South Sumatra Province. Furthermore, the coefficient of determination (R^2) of 0.9972 means that the GRDP variable variation was equal to 99.72% in districts/cities of South Sumatra province explained by the employee, goods, and capital expenditure. The rest 0.28% can be explained by other factors.

Keywords: employee expenditure, goods expenditure, capital expenditure, GRDP, Fixed Effect Model (FEM)

Chairperson,

Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc.
NIP. 196402161989032001

Member,

Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si.
NIP. 197007162008012015

Acknowledged by,
Head of the Department of Development Economics

Dr. Mukhlis S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

This is a true and correct translation of the copied document,
Technical Implementation Unit for Language
University



Simone A. Loeneto, M.A., Ph.D.
NIP. 19550413 198403 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang terus berbenah dalam meningkatkan pertumbuhannya ekonominya. Tarigan (2014) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi pada wilayah tertentu yaitu kenaikan seluruh nilai tambah.

Pemerintah memiliki peran penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi agar mampu memperlancar pembangunan ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dicerminkan oleh meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah tersebut. Kebijakan fiskal dijadikan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Chaerani, 2018).

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperbarui sistem perekonomian, maka diberlakukanlah UU Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur

tentang Perimbangan Keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya adalah desentralisasi. Dilanjutkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Kemudian, ditegaskan kembali pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lin dan Liu (2002) juga menyatakan bahwa desentralisasi sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi.

Hutabarat (2013) menyatakan jika diberlakukan sistem daerah otonom, maka akan diiringi oleh desentralisasi fiskal dan keuangan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem tersebut juga berlaku pada daerah yang melakukan pemekaran baik pada provinsi maupun kabupaten/kota yang tujuan akhirnya adalah naiknya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat klasifikasi ekonomi dari pengeluaran pemerintah yang terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Sedangkan, Belanja modal terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dalam pengerjaan, dan aset lainnya

Bila dilihat dari postur komponen belanja daerah di tingkat kabupaten/kota, belanja pegawai memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan 4 komponen utama belanja daerah.

Tabel 1.1 Postur Belanja Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Belanja Daerah	2017		2018	
	Triliun Rupiah	Persen	Triliun Rupiah	Persen
Belanja Pegawai	318	41,3	320	39,8
Belanja Barang/jasa	165,5	21,5	191,8	23,8
Belanja Modal	166,3	21,6	164,2	20,4
Belanja Lainnya	119,8	15,6	128,2	15,9
Total	769,6	100	804,2	100

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI

Tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2018, belanja daerah dalam skala kabupaten/kota mengalami pertumbuhan sebesar 4,5 persen dari tahun 2017. Pada skala kabupaten/kota komponen belanja pegawai menduduki posisi dengan rasio tertinggi yaitu 41,3 persen di tahun 2017 dan 39,8 persen di tahun 2018.

Adapun komponen dalam belanja daerah yang mengalami peningkatan rasio dari 2017 menuju 2018 yaitu belanja barang dan jasa yaitu sebesar 2,3 persen dan belanja lainnya yaitu sebesar 0,3 persen. Sedangkan komponen belanja daerah yang mengalami penurunan rasio adalah belanja pegawai sebesar 1,5 persen dan belanja modal sebesar 1,2 persen.

Dalam kegiatan perekonomian daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun (BPS, 2015).

Khususnya di provinsi Sumatera Selatan, data mengenai jumlah PDRB yang dihasilkan nilainya bervariasi baik dilihat dari pendekatan pengukuran, lingkup data dan asumsi yang digunakan serta sumber data. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Kondisi perekonomian provinsi Sumatera Selatan sampai akhir tahun 2018, beberapa indikator ekonomi yang mempengaruhi secara makro yaitu pertumbuhan ekonomi makro dan konsumsi pemerintah yang ditunjukkan oleh nilai PDRB.

Secara teori, semakin besar jumlah PDRB maka akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini juga akan mempengaruhi besarnya pendapatan yang diperoleh daerah sehingga alokasi belanja pusat ke daerah akan meningkat dan memberikan dampak pada pengeluaran pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Nasution (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja.

PDRB di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kabupaten/kota dengan PDRB tertinggi adalah Palembang dengan nilai 118.716 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat menjadi 42.238 milyar rupiah pada 2018. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB terendah adalah Pagar Alam yaitu sebesar 2.413,76 milyar rupiah pada

tahun tahun 2016 dan 2.678,83 milyar rupiah pada 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2016	2017	2018
1	Musi Banyuasin	54.931.520	58.184.620	60.730.040
2	Ogan Komering Ulu	11.534.620	12.389.030	13.408.460
3	Muara Enim	42.402.210	47.105.260	52.727.550
4	Ogan Komering Ilir	23.433.540	25.196.230	26.970.800
5	Lahat	14.458.550	15.053.250	15.986.880
6	Musi Rawas	14.909.740	15.927.890	17.499.930
7	Banyuasin	22.833.430	24.564.790	26.540.630
8	Ogan Komering Ulu Selatan	7.037.070	7.598.500	8.163.450
9	Ogan Komering Ulu Timur	12.149.680	12.742.750	13.848.000
10	Ogan Ilir	8.860.600	9.513.850	10.335.360,00
11	Empat Lawang	4.183.160	4.438.770	4.695.590
12	PALI	5.411.730	5.883.700	6.495.770
13	Musi Rawas Utara	6.073.230	6.408.630	6.757.100
14	Palembang	118.715.620	130.415.690	142.238.390
15	Prabumulih	6.107.160	6.587.090	7.193.070
16	Pagar Alam	2.413.760	2.545.460	2.678.830
17	Lubuklinggau	5.153.570	5.633.070	6.146.550
Sumatera Selatan		309.346.400	360.609.190	390.188.580

Sumber: BPS Sumatera Selatan (data diolah)

Di sisi lain, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pemerintah juga cukup berperan. Hal ini mengharuskan pengelolaan konsumsi pemerintah perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan indikator-indikator ekonomi yang akan dicapai. Konsumsi pemerintah memiliki banyak komponen, salah satunya belanja pegawai. Pemerintah akan melakukan balas jasa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pelayanannya kepada masyarakat berupa gaji dan penghasilan lainnya. Naiknya gaji dan pemberian penghasilan lainnya seperti tunjangan atas kinerja merupakan upaya peningkatan

kesejahteraan dan kinerja PNS. Peningkatan tersebut dilakukan dengan harapan meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat (Hutabarat, 2013).

Dalam periode 2016 sampai 2018, kabupaten/kota dengan belanja pegawai tertinggi adalah Palembang yaitu sebesar 164.695 milyar rupiah di tahun 2016 dan 151.983 milyar rupiah di tahun 2018. Kemudian diikuti oleh Musi Banyuasin yaitu sebesar 94.084,7 di tahun 2016, 80.821,9 di tahun 2017 dan sebesar 81.393,4 di tahun 2018. Sedangkan, nilai belanja pegawai terendah adalah Musi Rawas Utara yaitu sebesar 14.654 milyar rupiah di tahun 2016 dan sebesar 17.812,1 milyar rupiah di tahun 2018. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3 Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Belanja Pegawai		
		2016	2017	2018
1.	Musi Banyuasin	94.084,7	80.821,9	81.939,4
2.	Ogan Komering Ulu	57.097,1	49.232,2	50.359,2
3.	Muara Enim	72.757,4	72.180,6	73.965
4.	Ogan Komering Ilir	72.099,2	76.587,1	76.794,3
5.	Lahat	69.199,7	64.143,3	63.614,1
6.	Musi Rawas	55.180,8	48.318,4	54.623,9
7.	Banyuasin	72.388,5	71.370,7	70.558,1
8.	Ogan Komering Ulu Timur	65.086,5	60.558,7	61.522,4
9.	Ogan Komering Ulu Selatan	42.827,3	39.279	40.308,7
10.	Ogan Ilir	54.310,8	49.392,9	48.080,6
11.	Empat Lawang	26.233,7	26.731,9	26.972,1
12.	PALI	15.521	10.344,5	16.556
13.	Musi Rawas Utara	14.654	14.493,4	17.812,1
14.	Palembang	164.695	14.1260	151.983
15.	Prabumulih	38.408,5	34.536,6	35.247
16.	Pagar Alam	31.187,7	27.577,6	28.646,8
17.	Lubuklinggau	41.096,5	36.548,5	3.5612,5
Sumatera Selatan		986.829,0	903.378,0	934.595,0

Sumber: DJPbN Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)

Kemudian, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belanja barang dilaksanakan oleh pemerintah guna mendukung layanan pada masyarakat yang berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi suatu wilayah. Tahun 2018, tercatat hasil realisasi belanja barang sebesar 264,7 triliun atau sekitar 77,8 persen dari target yaitu 340,1 triliun. Pada belanja barang/jasa tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 233,9 triliun dan mencapai 270,6 triliun rupiah di tahun 2018. Jika di proporsikan yaitu dari 21,3 persen menjadi 23,5 persen (Sari, 2017).

Tabel 1.4 Belanja Barang di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Belanja Barang		
		2016	2017	2018
1	Musi Banyuasin	65.955,0	78.601,9	83.54,1
2	Ogan Komering Ulu	24.554,6	32.006,2	37.311,9
3	Muara Enim	52.787,5	53.005,6	62.934,5
4	Ogan komering Ilir	39.670,6	36.573,6	30.885,9
5	Lahat	36.582,0	34.818,8	34.087,0
6	Musi Rawas	27.114,6	29.787,3	42.614,8
7	Banyuasin	35.897,0	46.217,8	46.270,7
8	Ogan Komering Ulu Timur	29.305,4	29.212,7	38.107,1
9	Ogan Komering Ulu Selatan	19.198,5	22.113,1	26.881,1
10	Ogan Ilir	16.719,8	21.047,6	27.411,6
11	Empat Lawang	17.744,5	23.943,6	25.798,0
12	PALI	22.933,6	17.646,0	49.440,6
13	Musi Rawas Utara	19.615,2	19.055,1	22.431,4
14	Palembang	66.457,7	80.804,3	96.804,1
15	Prabumulih	26.008,5	32.642,7	32.204,4
16	Pagar Alam	22.562,6	25.230,3	25.230,3
17	Lubuklinggau	17.340,2	20.912,8	19.242,0
Sumatera Selatan		540.447,3	603.619,4	701.009,5

Sumber: DJPbN Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)

Tabel 1.4 menunjukkan nilai pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan belanja barang di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan periode

2016-2018. Kabupaten/kota dengan nilai tertinggi adalah Palembang yaitu sebesar 66.457,7 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat menjadi 96.804,1 milyar rupiah di tahun 2018. Sedangkan nilai belanja barang terendah adalah Ogan Ilir yaitu sebesar 16.719,8 di tahun 2016 dan 27.411,6 milyar rupiah di tahun 2018.

**Tabel 1.5 Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2016-2018 (milyar rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal		
		2016	2017	2018
1	Musi Banyuasin	57.065,6	69.952,9	87.195,2
2	Ogan Komering Ulu	16.777,9	33.885,6	34.830,9
3	Muara Enim	56.687,1	50.916,9	55.675,4
4	Ogan Komering Ilir	56.099,0	44.847,9	27.971,8
5	Lahat	37.348,5	32.937,3	31.309,1
6	Musi Rawas	43.902,0	30.048,2	34.866,4
7	Banyuasin	36.847,5	30.310,4	24.271,2
8	Ogan Komering Ulu Timur	32.115,0	27.515,6	27.813,1
9	Ogan Komering Ulu Selatan	37.300,4	28.222,8	31.160,5
10	Ogan Ilir	223.322	333.658	259.318
11	Empat Lawang	198.933	202.984	248.395
12	PALI	35.112,4	27.619,3	61.684,1
13	Musi Rawas Utara	35.498,7	27.650,5	32.310,1
14	Palembang	57.770,4	84.031,5	85.300,6
15	Prabumulih	22.827,5	16.239,4	11.955,1
16	Pagar Alam	24.664,8	19.524,1	8.913,2
17	Lubuklinggau	20.518,2	23.202,1	20.345,4
Sumatera Selatan		540.447,3	935.019,6	1.083.547

Sumber: DJPbN Provinsi Sumatera Selatan (data diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan belanja modal kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dan penurunan di masing-masing kabupaten/kota tentu saja hal ini berbeda sesuai dengan keperluan daerah masing-masing dan mampu berpengaruh positif pada upaya menaikkan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan suatu perekonomian.

Hal tersebut dapat dilihat dari total belanja modal provinsi Sumatera Selatan sebesar 540.447,3 milyar rupiah di tahun 2016, lalu meningkat menjadi 935.019,6 milyar rupiah di tahun 2017 dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 1.083.547 milyar rupiah. Berbeda dengan belanja pegawai dan belanja barang yang di dominasi oleh kota Palembang. Pada belanja modal, Ogan Ilir menjadi kabupaten/kota dengan angka tertinggi yaitu sebesar 223.322 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat menjadi 259.318 milyar rupiah di tahun 2018. Sedangkan Ogan Komering Ulu merupakan kabupaten/kota dengan belanja modal terendah yaitu sebesar 16.777,9 milyar rupiah di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2018 yaitu sebesar 34.840,9 milyar rupiah.

Porsi belanja pegawai yang meningkat selalu menjadi sorotan masyarakat, karena setiap Presiden mengumumkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), jumlah belanja pegawai cukup mendominasi. Lalu muncul berbagai pertanyaan atas fenomena tersebut. Hal apa yang menyebabkan belanja pegawai lebih populer dibandingkan dengan belanja lainnya (Mutiarin, 2012).

Berdasarkan uraian di atas mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal memiliki pengaruh terhadap nilai PDRB kabupaten/kota di Sumatera Selatan serta beberapa fenomena mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal di kabupaten/kota khususnya di Sumatera Selatan. Kemudian, jika dikaitkan lebih lanjut dengan angka PDRB yang menjadi ukuran kinerja pembangunan ekonomi dalam rangka pertumbuhannya, hal ini tentunya akan memberikan pengaruh pada pengeluaran pemerintah. Jumlah PDRB di kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang terus meningkat tiap tahunnya akan

menyebabkan belanja daerah khususnya pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebagai komponen utama meningkat.

Oleh karena itu, disimpulkan judul dari penelitian ini ialah pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaruh belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terhadap Produk Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai analisis belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam upaya mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Eideh, O. 2015. *Causality between Public Expenditure and GDP growth in Palestine: An Econometric Analysis of Wagners Law's*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, 6 (2), 189-199.
- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Al-Shatti, A. 2014. *The Impact Of Public Expenditure On Economic Growth In Jordan* . Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan, 6 (10), 157-167
- Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kota Lahat.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kota Palembang.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kota Pagar Alam.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik Daerah Kabupaten PALI.
- Boediono. 1992. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.
- Chaerani, Eva Yunadia. 2018. Dilansir pada Artikel dan Opini Publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kebijakan-fiskal-kaitannya-dengan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia/>

- Darwanto dan Yulia. 2007. Pengaruh pembagian ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Universitas Indonesia.
- Darwanto, dan Yulia Yustika. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 26-28 Juli, Makassar.
- Darwis, Erstelita Tria. 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Padang: Universitas Sumatera Barat.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2016-2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2018. Ringkasan APBD
- Endang Rahayu, Sri. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. Medan. Jurnal Manajemen dan Bisnis.
- Fajri, Ahmad. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi-Provinsi di Sumatera. *Ejurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 1(4), hal 29-35.
- Gathama Putra, Noris. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Operasi Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah (2005 – 2008). Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter D. C. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.
- Haryanto, Tomi Priyo. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), Hal 148-158.
- Hidayah, Maruf. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur. Yogyakarta Universitas Gadjah Mada.

- Hutabarat, Parmadean. 2013. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- Kurniawan, Romai. 2016. Pengaruh Belanja Operasi, Belanja Modal, PDRB dan Tingkat kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014. Universitas Gadjah Mada.
- Lestyowati, Jamila. 2009. Analisis Pengaruh Belanja Pegawai Pemerintah, Investasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia, SPs-USU, Medan.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. Ekonomi Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat. Erlangga: Jakarta.
- Mauliansyah, Roni. Pengaruh Investasi Dan Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Aceh. 2017. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi 1(2), hal 187-195.
- Minggu, Rimate dan Rotinsulu, D. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Miranti, Jeli. 2019. Analisis Perkembangan kota Pagar Alam Masa Walikota Ida Fitriani Tahun 2013-2017. Jurnal Agastya 9(2), hal 201-220.
- Muhyiddin, Tarmizi dan Yulianita. 2017. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori Konsep dan Rencana Proposal. Salemba Empat
- Musaba, E. 2013. *Impact of Government Sectoral Expenditure on Economic Growth in Malawi, 1980-2007*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, 4 (2), hal 71-78.
- Nazir. 1998. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. *Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria*. *International Journal of Economics and Finance*, 4(11),hal 172-182.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/Pmk.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Publikasi Badan Pusat Statistik. 2017. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka.
- Publikasi Badan Pusat Statistik. 2018. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka.
- Publikasi Badan Pusat Statistik. 2019. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka.
- Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rekanaharto, M. 2014 Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003-2012. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Sabir dkk. 2013. “*Local Government Expenditure, Economic Growth and Income Inequality in South Sulawesi Province*“ *Journal of Applied Economics and Business University of Hasanuddin*. Indonesia.
- Samsuri, Singgih. 2016. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Se-Sumatera. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sanneng, P. 2016 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar: UIN Alauddin.
- Sari, Valenta Elisa. 2017. Dilansir pada CNN Indonesia <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20170510130143-78213766/seperempat-apbn-masih-dipakai-untuk-bayar-pegawai>
- Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern. PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati, Niken. 2010. Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan, Robinson. 2014. Ekonomi Regional. Jakarta: Bumi Angkasa.

Todaro, P. 2002. Pembangunan Ekonomi Dunia ke Tiga, Edisi 7. Erlangga: Jakarta.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155. Ambon.

Wildan, Muhammad. 2019 dilansir pada EkonomiBisnis.com <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190719/10/1126443/alokasi-apbd-paling-dominan-untuk-belanja-pegawai>